

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 112 Hal
- Arsyad, L., Satriawan, E., Mulyo, J.H., dan Fitriady, A. 2011. Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 151 Hal.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. Jakarta. 86 Hal
- [BPS] Badan Pusat Statistik . 2013. Pengeluaran Perkapita daerah perkotaan dan pedesaan. Jakarta. 99 Hal
- [BPS] Badan Pusat Statistik . 2013. Variabel Penentuan Rumah Tangga Miskin. Jakarta. 89 Hal
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Alokasi Pagu Rastra Provinsi Sumatera Barat.. Jakarta. 56 Hal
- Cahyat, Ade. 2004. Bagaimana Kemiskinan Diukur: Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia. CIFOR (Center for International Forestry Research). 8 Hal.
- Dikmar. 2001. Kajian Tentang Prinsip dan Strategi Pembangunan Pedesaan/Nagari di Sumatera Barat. No, 979-3528-14-1. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Barat.
- Dunn, William N. 1994. Public Policy Analysis, New Jersey . Prentice Hall.Inc. 309 P.
- Friedman. 1998. Keperawatan Keluarga (Teori dan Praktik). Jakarta : EGC. 683 Hal
- Hardjanto, N.J.M.T. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pedesaan dalam Perspektif Budaya. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press). 16 hal.
- Harrison, Lisa, 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana. 204 Hal.
- Husein Umar. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. 136 Hal.
- Islamy, Irfan. 2007. Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi aksara. 114 Hal.

- [Kemenko PMK RI] Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera tahun 2017. Jakarta
- [Kemensos RI] Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2017. Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai. Jakarta
- Korten, David C. 2002. Menuju Abad ke 21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 416 Hal.
- Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi actor dalam proses perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu. 214 Hal.
- Muljana, B.S dan Surono, S. 2010. Pembangunan Perdesaan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan. Bogor : IPB Press.
- Prasetyo, B., dan Jannah. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 252 Hal
- Setiadi, E.M., dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana. 960 Hal
- Soekanto, Soerjono. 1992. Memperkenalkan Sosiologi. Jakarta : Rajawali Press. 436 Hal
- Subarsono A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 138 Hal
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 380 Hal
- Sukirno, Sadono. 1985. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta : Bina Grafika. 336 Hal
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1995. Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya. 126 Hal
- Umar, Husein. 2003. Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Thesis bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. 335 Hal
- Wanggai, Velix. 2012. Pembangunan untuk Semua Mengelola Pembangunan Regional ala SBY. Jakarta : Bina Graha. 425 Hal
- Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha . Ilmu 88 Hal.

B. Jurnal dan Peraturan perundang-undangan

Bungkaes, H.R., dkk., 2013. Hubungan efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal "ACTA DIURNA", Edisi April 2013.

Focus group Discussion (FGD) Penerapan Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Raskin. Perhimpunan ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) di Jakarta, Senin 29 Mei 2017

Maryana 2011. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010. Jurnal 2011

Rachman, P.S, dkk., 2005. Kebijakan Pengelolaan cadangan Pangan pada era otonomi daerah dan perum Bulog. Jurnal Pusat analisis social ekonomi dan kebijakan pertanian. Bogor 2005

Undang- undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

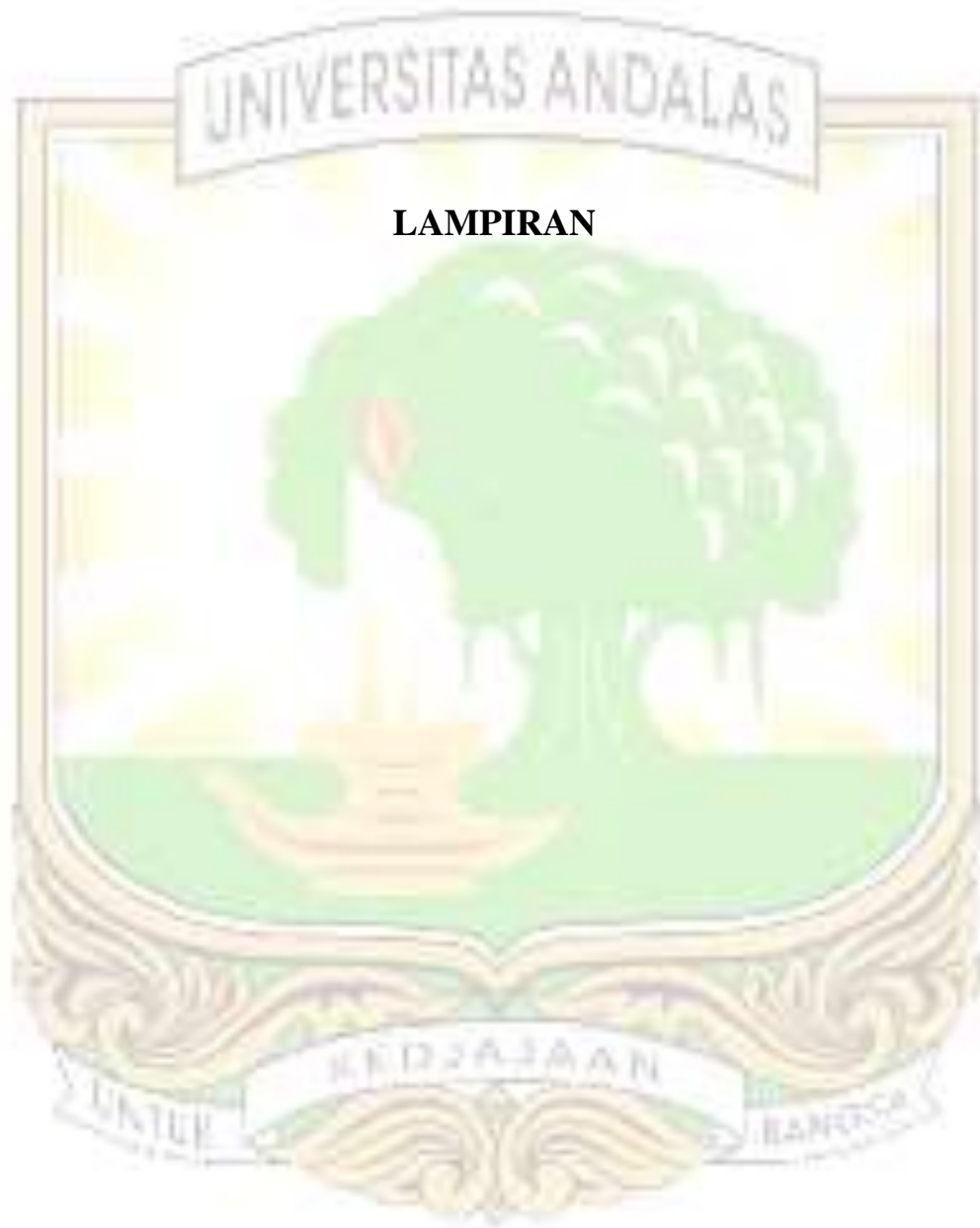
C. Internet

Akurat.co 2017. Penyaluran BPNT harus diawasi agar terhindar dari penyelewengan. <http://news.akurat.co/id-18101-read-> diakses pada hari Minggu 07 Mei 2017, pukul 10.00 WIB.

Antarasumbar.com . 2017. Penyaluran Raskin di Kota Pariaman mengalami pengurangan jumlah KPM . <http://www.antarasumbar.com/berita/204040/html> diakses pada hari Kamis 20 April 2017, pukul 19.30 WIB.

Siaran Pers Kemenko PMK. 2017. Nomor : 34/HumasPMK/III/2017 tentang Kemenko Pastikan Subsidi Raskin dan BPNT tepat Sasaran pada tanggal 05 Maret 2017 melalui website kemenkopmk.go.id diakses pada tanggal 27 April 2017 Pukul 20.00 WIB

Wartaekonomi.co.id. 2017. Penyaluran BPNT di padang belum maksimal. <http://wartaekonomi.co.id/read137033/html> diakses pada tanggal 16 Mei 2017 Pukul 20.30 WIB



LAMPIRAN